

PERAN PEDAGOGI BAHASA DAN SASTRA DALAM PENDIDIKAN HUMANIORA

Yohanes Mariano Dangku

Prodi Bahasa Indonesia STKIP St. Paulus, Jl. Ahmad Yani, No.10, Ruteng 86508
e-mail: ymdangku73@gmail.com

Abstract: The Role of Language and Literature Pedagogy in Humanistic Education. Crisis of values is now taking place in all aspects of life including education. The question to be critically discussed is how does language center empower language and literature pedagogy to encounter crisis of values? Language and literature pedagogy can incorporate ethical values in teaching-learning process. Hence, language teachers can empower language for learning and forming learners' personality.

Keywords: crisis of ethical values, language pedagogy, literary pedagogy

Abstrak: Peran Pedagogi Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan Humaniora. Saat ini krisis nilai sedang terjadi. Itu menyalahkan hampir semua hal termasuk bidang pendidikan. Bagaimana lembaga bahasa memberdayakan pendidikan bahasa dan sastra untuk menghadapinya? Pedagogi bahasa dan pedagogi sastra dapat membantu untuk memediasi nilai-nilai etika dalam proses belajar mengajar. Jadi guru bahasa dapat memberdayakan bahasa untuk belajar dan membentuk kepribadian peserta didik.

Kata Kunci: krisis nilai-nilai etika, pedagogi bahasa, pedagogi sastra

PENDAHULUAN

Dalam uraian segi-segi aksiologis pendidikan disimpulkan bahwa pendidikan tanpa dimensi aksiomatik adalah pendidikan yang simptomatik. Pendidikan yang dikembangkan semata-mata karena hasrat instinktual, bukan pendidikan yang didesain secara holistik. Pendidikan simptomatik bukan hanya miskin nilai, tetapi juga berbahaya. Sebab, pendidikan kehilangan kendali, ketiadaan kontrol sehingga pendidikan dikerek dan diarak para jawara yang sesuka hati, tanpa memperhatikan kehidupan banyak orang. Kehancuran dunia karena peperangan adalah contoh nyata perilaku 'didikan' yang tidak mencerminkan jiwa terdidik.

Dalam artikel ini disajikan peran pendidikan bahasa dalam krisis moral dalam pendidikan. Topik ini diuraikan berangkat dari kesadaran bahwa etika dibutuhkan bukan karena krisis dunia, nasional, dan lokal semata, tetapi reposisi etika pada inti pendidikan sendiri. Pendidikan sudah seharusnya mengintegrasikan edukasi dan formasi. Lebih dari itu, pendidikan

menjadi wahana transformasi pribadi manusia melalui didaktik dan etik. Dengan rumusan lain, pendidikan sejati selalu berkarakter etis, yaitu pendidikan yang menghasilkan insan-insan yang berakhlak, bermoral. Untuk menghasilkan insan-insan yang demikian, pendidikan bahasa dapat memainkan perannya.

PEMBAHASAN

Pertama-tama dibahas kondisi krisis moral yang semakin kritis. Kondisi demikian menuntut revitalitas etika dalam pendidikan. Namun demikian, revitalitas belum memadai jika tidak disertai redefinisi dan reposisi etika dalam menyelenggarakan pendidikan. Secara spesifik dibahas peran yang dapat dimainkan pendidikan dalam rangka edukasi dan formasi pribadi peserta didik. Pendidikan bahasa tidak sekadar mengedukasi, tetapi juga memformasi peserta didik agar menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak.

Krisis dalam Pendidikan

Terdapat dua fase dalam sejarah filsafat pendidikan berdasarkan gaya berfilsafat. Fase pertama, fase yang cenderung terpesona dengan gagasan-gagasan besar, seperti pragmatisme, esensialisme, dll. Fase kedua berciri analitik, yaitu menekankan kejelasan (*clarity*), kegunaan (*utility*), presisi (*precision*), dan fokus pada bahasa pendidikan (Strike dan Egan, 2010:x).

Peters dalam esei *Ambiguities in Liberal Educating and the Problem of its Content* (dalam Strike dan Egan, 2010:2-14) mengemukakan ambiguitas-ambiguitas pendidikan liberal. Ambiguitas-ambiguitas tersebut dapat dilihat sebagai ketidakjelasan bawaan karena formula yang tidak definitif dan juga upaya penidakjelasan sebagai alat ideologis. Pada yang terakhir seringkali luput dari perhatian banyak pihak sehingga menelan begitu saja menu sajian pendidikan Barat. Sementara, hal tersebut dilakukan sengaja agar pan westernisasi meraja dan meraja lela ke segenap muka bumi.

Pertama-tama yang dicatat Peters adalah kemeluasan pemahaman liberal sebagai *free*, bebas; kemeluasan yang disebutnya endemik dan sumber ambiguitas konseptual. Argumen Peters sederhana, tetapi mengena, yaitu bahwa tidak ada satu hal pun yang bebas secara mutlak. Sebab, kebebasan itu sendiri bersifat sistemik dan sebagai sesuatu yang berada dalam suatu sistem kebebasan tersebut sudah seharusnya mengikuti *rule of the game*. Muaranya jelas, yaitu bahwa pengambilalihan pendidikan liberal justru pengambilalihan sistem pendidikan Barat yang seringkali bertabrakan dengan sistem di mana pendidikan liberal digunakan atau diterapkan. Secara sederhana dinyatakan bahwa kebebasan yang dimaksud menjadi kebebasan menurut perspektif Barat.

Ambiguitas lain adalah bahwa dalam pendidikan liberal urusan nilai adalah urusan pengguna, sedangkan yang diutamakan adalah konten berupa pengetahuan dan pemahaman. Dalam pasar pendidikan liberal, yang dipasarkan adalah pengetahuan dan pemahaman. Jika berbicara nilai, maka nilai yang dimaksud adalah profit, keuntungan. Nilai yang berguna adalah nilai yang menguntungkan. Oleh karena itu pendidikan liberal tidak bisa dilepaskan dari semangat zaman pasca-Perang Dunia II, yaitu progresivisme. Kemajuan harus dihela secara masif, massal, dan ekstrapcepat agar bisa maju dan keluar dari puing-puing kehancuran. Pendidikan harus menjadi instrumen kunci untuk memajukan dunia melalui

ilmu dan teknologi. Jadi, pendidikan terlalu mengejar keuntungan teknis melalui penerapan ilmu sehingga mengabaikan nilai etis. Pendidikan mengejar nilai keuntungan bagi manusia, tetapi justru menghantam nilai kemanusiaan. Pendidikan tidak lagi menjadi humanisasi, tetapi justru menjadi dehumanisasi.

Secara rinci ambiguitas-ambiguitas 'ideologis' pendidikan liberal di kemukakan Peters. Dengan paradigma interpretif dia mengemukakan beberapa interpretasi yang justru memperparah dampak pendidikan liberal. Interpretasi tersebut justru menimbulkan keparahan dalam perkembangan dunia pendidikan.

Pertama, pendidikan liberal memberikan kebebasan kepada 'pembeli' untuk memilih *vocational skill* yang dibutuhkan. Sebab, 'para pembeli' membutuhkan pengetahuan dan pemahaman untuk disiplin yang dipilihnya. Para pembeli sejenis ini laksana pemburu yang berburu ilmu. Jika mereka telah menemukan pengetahuan dan pemahaman, maka mereka menerapkan ilmu dan teknologi itu untuk memperoleh benefit, profit, keuntungan yang berlimpah. Bagi mereka keuntungan didapat dan seberapa besar pendapatan tersebut hal-hal itu merupakan hak mereka. Ditemukannya pihak yang kalah bersaing atau kemiskinan yang diakibatkannya hanyalah hukuman kemalasan dan kelemahan daya saing. Pendidikan liberal ternyata memodernisasi semacam hukum rimba baru.

Kedua, overvokasionalisasi dan overspesialisasi atas nama kebebasan memilih ilmu dan mengembangkan ilmu memandekkan dan bahkan menutup pintu untuk terjadinya dialog etis untuk menata setiap vokasi sebagai potensi-potensi pendidikan yang harus ditata sekian sehingga dihela secara sinergis untuk kemasalahatan bagi semua manusia. Khotbah John Henry Newman tentang *all round development* seperti dirilis Peters secara kontekstual dimaknai sebagai ekspresi kegerahan dan kegelisahan para rohaniwan terjadap bahaya dehumanisasi di balik pendidikan liberal. Diharapkan bahwa dialog dan sinergi pengembangan harus dimulai dari rahim pendidikan karena masyarakat modern lahir dari rahim pendidikan. Agar dilahirkan generasi yang berpikir tentang pembangunan menyeluruh (*all round development*) terwujud, maka dunia pendidikan harus mengembangkan dialog dan integrasi *academical spirit*, jiwa akademis yang dialogis dan integral.

Ketiga, dogmatisme dalam pendidikan. Perburuan pengetahuan dan pemahaman pada akhirnya

menyesatkan pemahaman tentang pengajar dan pengajarannya. Guru dicari, didengar, dan bahkan dipuja karena dia dilihat sebagai sumber ajaran dalam pengajaran. Ironisnya bahwa jiwa liberal justru menjadi lumpuh oleh perburuan pengetahuan ini. Segala sesuatu yang dikatakan dan diajarkan guru diterima sebagai benar. Guru-guru seolah-olah makhluk serba tahu. Sebaliknya pengajaran dapat dilihat sebagai indoktrinasi, yaitu penjejalan doktrin-doktrin yang harus dikonsumsi sekenyangan-kenyangnya agar peserta didik cukup modal untuk penerapan guna meraih profit. Jadi, secara tidak disadari kaum liberal sendiri, pendidikan menjadi sesuatu yang dogmatis. Sementara, banyak ikutan dalam pendidikan merupakan agenda institusi (partai, rejim, sekolah) dan pribadi yang atas nama pendidikan ditanamkan kepada para pembelajar. Secara anamnetis, justru hal terakhir inilah yang dimainkan Orde baru melalui NKK, Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), yaitu bahwa institusi pendidikan yang normal hanya berurusan dengan pengetahuan dan pemahaman, bukan kritik dan demonstrasi.

Peran Pedagogi Bahasa dan Sastra

Chambers dan Gregory (2006) juga menguraikan krisis dalam dunia pendidikan. Kedua sarjana mengidentifikasi beberapa masalah yang disebabkan desain pembangunan pendidikan yang berorientasi teknis. Pertama, masifikasi, yaitu perluasan dan pembanyakan lembaga-lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan temporer (sementara) dan emergens (darurat), sedangkan mutunya kurang diberdayakan. Kedua, pendidikan berorientasi pasar, yaitu bahwa lembaga-lembaga pendidikan 'didikte' pasar sehingga tamatannya lebih mengandalkan ready made, siap pakai, tetapi kurang memperhatikan kepentingan publik. Pendidikan dikapitalisasi agar menghasilkan tenaga-tenaga yang laku di pasar tenaga kerja. Ketiga, dampak ikutannya juga adalah peserta didik menjadi calon-calon onderdil dalam mesin raksasa kapitalisme. Capaian-capaian pembelajaran dirumuskan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mengabaikan dimensi etis. Wacana pedagogik instrumental menjadi rejim kesadaran pelaku dan peserta didik (Chambers dan Gregory, 2006:1). Keempat, para peserta didik dihela untuk menjadi sumber daya industri dan dikendalikan teknologi komunikasi dan informasi. Peserta didik disiapkan untuk terampil memanfaatkan teknologi, sementara kesadaran kritis dan kreatifnya dilumpuhkan. Kelima, pemercepatan dan

pemudahan akses pendidikan menimbulkan pendidikan jarak jauh menjamur dan melemahkan pendidikan konvensional. Sementara hasil atau keluaran (*output*) pola perluasan tersebut lebih instan daripada intens; lebih banyak menghasilkan keluaran, tetapi miskin mutunya.

Secara kultural, pemercepatan dan perluasan akses pendidikan yang masif dan instan tersebut justru menimbulkan benturan dan bahkan, perang budaya, *culture wars* (Chambers dan Gregory, 2006:4). *Lex tallionis*, hukum rimba, yang dahulu meraja dan meraja jela pada zaman jahiliah justru tersaji secara canggih dan cerdas di era modern. Budaya-budaya dominan mengencet dan bahkan menggusur budaya-budaya lemah. Terjadi semacam krisis kultural, yaitu budaya asli tergusur dari lokalitas dan terkooptasi budaya baru. Identitas budaya meluntur dan bahkan menghilang karena pesona budaya baru. Dunia dibuat lumpuh kesadarannya bahwa sebenarnya globalisasi sudah menjadi sinonim untuk westernisasi atau amerikanisasi.

Menghadapi tantangan tersebut, bagaimanakah sebaiknya pendidikan diselenggarakan dan dikelola? Secara eksplisit Chambers dan Gregory menyatakan bahwa untuk mengatasi krisis tersebut dibutuhkan pedagogi kritis. Dalam lingkup studi bahasa, dirumuskan tegas bahwa dibutuhkan literasi kritis (Bdk.Hidayat, 2013:9–0)

Literasi kritis pada dasarnya dibangun di atas tiga pilar, yaitu alfabetisasi, dialog, dan konsientisasi. Tiga pilar tersebut memperlihatkan ciri diskursif (kewacanaan) pedagogi Freire. Alfabetisasi berkenaan dasar dengan literasi fundamental, yaitu penguasaan aksara yang tampak melalui keterampilan membaca dan menulis. Dialog berkenaan dengan keterampilan mempercakapkan kecakapan (*logos*), saling menukarkan pendapat, dan syering kelebihan, kekurangan; berbagi suka cita dan duka cita. Seseorang tidak sekadar literat, melek aksara, tetapi mendayagunakan literasi untuk mendialogkan dimensi-dimensi kehidupan. Sementara, konsientisasi berpautan dengan penyadaran, yaitu pendakuan, pendalaman, dan penghidupan pengetahuan, nilai, dan sikap (Smith, 2008:53–60).

Namun, Freire mengingatkan bahwa kaum tertindas bukanlah objek pendidikan. Justru kegagalan upaya pembebasan terjadi karena kaum ini diperlakukan sebagai objek. Dia menyarankan beberapa hal. Pertama, kaum tertindas pertama-tama harus disadarkan bahwa mereka tertindas. Sebab, kaum ini secara struktural diupayakan tidak sadar

melalui mekanisme bantuan karitatif sehingga mereka dininabobokan dan dibuat bergantung pada tuan-tuan kapitalis di kutub utara. Bantuan seperti Bank Dunia dan IMF menurutnya adalah tangan-tangan gurita kapitalisme dan neoliberalisme yang mencengkeram dunia. Dunia Ketiga dibuat takluk dan memuja mereka sebagai negara-negara donor yang berbelas kasih. Selama keadaan itu dibiarkan maka negara-negara berkembang, tetap menjadi pengemis dan bergantung pada negara-negara maju. Kedua, konsekuensi pembebasan adalah kebutuhan akan konsientisasi dalam pendidikan. Disadari bahwa yang paling penting dalam pendidikan adalah proses penyadaran ketertindasan diri dan kaum tertindas. Namun, Freire mengingatkan bahwa pendidikan tidak sekadar meleak aksara tetapi keberaksaraan yang kritis. Konsep yang terakhir inilah yang sekarang populer disebut pedagogi kritis. Ketiga, secara operasional pedagogi kritis diwujudkan melalui literasi kritis (Freire, 2008:10-50).

Bagi Chambers dan Gregory, literasi kritis menempatkan pendidikan bahasa pada posisi strategis (2006:11). Bagi mereka, bahasa dan sastra amat strategis membentuk dan mengembangkan pribadi-pribadi yang bermartabat. Secara tegas dia menyatakan bahwa bukan sekadar *pendidikan bahasa yang pedagogik* yang dibutuhkan, tetapi yang lebih penting adalah *pedagogi bahasa*. Mengapa? Sebab dalam dirinya bahasa sudah mengandung *ordo, order*, tatanan yang tertib dan menertibkan semua pemeroleh, pengguna, dan pembelajar bahasa. Ketertataan berbahasa, baik keteraturan gramatis maupun ketertataan secara sosial, adalah cermin imperatif berpikir dan berperilaku sosial yang tertib.

Terkait dengan segi yang ditekankan kedua sarjana tersebut, dalam konteks keindonesiaan dikenal norma halus budi bahasa. Berbahasa halus mencerminkan akal budi dan budi pekerti. Pengindahan kehalusan berbahasa menjadi norma sosial bagi masyarakat berbahasa Indonesia.

Sementara tentang segi berbahasa sastra, kedua sarjana menegaskan urgensi pedagogi sastra. Mereka mengemukakan distingsi *literature pedagogy* dan *literary pedagogy*. *Literature pedagogy* menunjuk pada karya-karya sastra tua dan klasik yang memunyai nilai-nilai luhur untuk generasi sekarang. Pembelajar bahasa perlu mempelajari sastra klasik untuk menggali nilai-nilai luhur autentik agar tetap diwariskan (*generating*). Sementara *literary pedagogy* menunjuk pada sastra yang dinamis dan kreatif sesuai zaman sekarang untuk terus mengasah kepekaan dan kehalusan budi.

Perlu pula ditambahkan masukan kritis dan strategis kedua sarjana untuk mengkoneksikan pembelajar dengan dimensi-dimensi etis bahasa dan sastra (2006:12-19). Pertama, kondisi kemanusiaan dalam rangka humaniora, usaha menjadikan manusia semakin manusia (*humanior*). Bahasa dan sastra berpotensi mengungkapkan atau menyembunyikan kemanusiaan manusia. Para pembelajar dibelajarkan untuk menemukan segi-segi kemanusiaan dan men-curigai setiap ideologi yang menindas manusia. Pembelajar yang humanior adalah pembelajar yang memunyai kepekaan terhadap kebutuhan dan penderitaan manusia. Kedua, relevansi, yaitu bahwa belajar bahasa dan sastra selalu relevan dan memunyai relevansi dalam pembentukan jati diri manusia. Belajar bahasa dan sastra adalah belajar untuk semakin mencintai kemanusiaan dan tertiba secara sosial. Ketiga, seperti bidang ilmu mana pun, pembelajaran bahasa mengembangkan kemampuan intelektual dan personal serta interpersonal. Keempat, pendidikan bahasa dan sastra membentuk kepekaan afektif dan pelibatan diri secara afektif dalam kebersamaan sosial. Kelima, dunia ini dikuasai narasi besar tentang gagasan besar dan orang-orang besar. Bahkan, *his-(story)*, sejarah sering dimanipulasi menjadi cerita dari dan tentang orang-orang besar sementara mayoritas orang-orang kecil diabaikan. Di sinilah dibutuhkan narasi-narasi tandingan untuk membela dan memberdayakan orang-orang yang terabaikan. Pendidikan bahasa dan sastra melalui studi bahasa kritis, analisis wacana kritis, dan bentuk-bentuk literasi kritis lainnya tampil mengembangkan kesadaran kritis yang lebih egaliter dan inklusif.

KESIMPULAN

Kritik terhadap krisis dalam sejarah pendidikan dunia merupakan cetusan-cetusan kebutuhan etika yang sering lenyap dan bahkan dilenyapkan dalam tren pendidikan yang amat dikuasai pragmatisme dan progresivisme. Pengutamaan nilai guna dan kebutuhan pemercepatan justru membawa dunia pada krisis dehumanisasi.

Redefinisi dan reposisi pendidikan sebagai lembaga edukatif dan formatif yang holistik, integral, dan komprehensif, mewajibkan pendidikan itu sendiri kepada jati dirinya yang berciri didaktis dan etis. Nilai-nilai didaktis pada dasarnya dibangun di atas dasar etika kemanusiaan universal sebagai digaukan para guru bangsa.

Secara strategis, pendidikan bahasa dan sastra merupakan bidang yang membelajarkan pedagogi dan literasi yang kritis. Pedagogi yang demikian berorientasi pada nilai-nilai etis dan perilaku-perilaku berhalus budi berbahasa. Dengan demikian belajar bahasa dan sastra bukan sekadar pemerolehan, pengetahuan, dan penguasaan suatu bahasa dan karya-karya sastra, tetapi menjadikan bidang tersebut sebagai pembentuk manusia-manusia yang berakhlak.

DAFTAR RUJUKAN

- Chambers, E., dan Gregory, M. 2006. *Teaching and Learning Elinglish Literature*. London: SAGE Publications.
- Freire, P. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Hidayat, R. *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Peters, R.S. "Ambiguities in Liberal Educating and the Problem of its Content" dalam Strike, Kenneth A. dan Egan, Kieran (Eds).2010. *Ethics and Educational Policy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Smith, W.A. 2008. *Conscientizacao, Tujuan Pendidikan Paulo Freire*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Strike, K.A., dan Egan, K. (Eds.). "Introduction" dalam Strike, Kenneth A. dan Egan, Kieran (Eds).2010. *Ethics and Educational Policy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.